

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DI KECAMATAN KUTA ALAM
BANDA ACEH TAHUN 2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**RISKA APRILIA
NPM : 1802110119**



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX, 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RISKA APRILIA
NPM : 1802110119

Dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DI KECAMATAN KUTA ALAM
BANDA ACEH TAHUN 2021**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si.
NIK. 19810823 201309 2 001

Pembimbing II

Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui,
Dekan,



Drs. Faridzi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RISKA APRILIA
NPM : 1802110119

Dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DI KECAMATAN KUTA ALAM
BANDA ACEH TAHUN 2021**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 06 Maret 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si.
NIK. 19810823 201309 2 001

Anggota

Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Anggota

Elviza, SE, M.Si.
NIK. 19840405 201112 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 10 Maret 2022
Yang Menyatakan



RISKA APRILIA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riska Aprilia

NPM : 1802110119

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH TAHUN 2021

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

Banda Aceh, 10 Maret 2022
Yang Menyatakan



RISKA APRILIA

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh”**. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapai cita citanya.
2. Bapak Drs, Tarmizi Gadeng, SE, M,Si, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M,Si, Ak, CA. selaku ketua Prodi Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si. selaku Ketua Laboratorium program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi, yang telah Meluangkan Waktu Dalam Mengarahkan Penelitian Ini.

5. Bapak Rusnaldi, SE, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi, Yang Telah Meluangkan Waktu Dalam Mengarahkan Penelitian Ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi khususnya staf pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Rekan-rekan satu angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu serta mengajarkan penulis untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan dari semua pihak demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah meridhainya. Amin.

Banda Aceh, 30 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	 9
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Pengertian Alokasi Dana Desa	9
2.1.2 Kompetensi Aparatur Desa.....	11
2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Aparatur Desa	11
2.1.2.2 Prinsip-prinsip Kompetensi Aparatur Desa	14
2.1.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Aparatur.....	14
2.1.2.4 Indikator Kompetensi Aparatur Desa	16
2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	19
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	19
2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	22
2.2 Penelitian Sebelumnya	25
2.3 Kerangka Pemikiran.....	29
2.4 Hipotesis.....	30

BAB III	METODE PENELITIAN	31
	3.1 Desain Penelitian.....	31
	3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	32
	3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
	3.4 Skala Pengukuran.....	35
	3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel.....	35
	3.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	36
	3.6.1 Pengujian Validitas.....	36
	3.6.2 Pengujian Reliabilitas	37
	3.7 Pengujian Asumsi Klasik	37
	3.7.1 Pengujian Normalitas	37
	3.7.2 Pengujian Autokorelasi	38
	3.8 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
	4.1 Hasil Penelitian	40
	4.1.1 Karakteristik Responden.....	40
	4.1.2 Persepsi Responden terhadap Variabel.....	42
	4.1.2.1 Persepsi Responden terhadap Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	42
	4.1.2.2 Persepsi Responden terhadap Variabel Kompetensi Aparatur Desa.....	45
	4.1.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	46
	4.1.3.1 Normalitas	46
	4.1.3.2 Autokorelasi	47
	4.1.4 Hasil Pengujian Keandalan Data	48
	4.1.3.1 Hasil Pengujian Validitas	49
	4.1.3.2 Hasil Pengujian Reliabilitas	49
	4.1.5 Hasil Pengujian Hipotesis.....	50
	4.1.5.1 Hasil Pengujian Hipoteiss Pertama	50
	4.2 Pembahasan	52
	4.2.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	52
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	54
	5.1 Kesimpulan	54
	5.2 Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	55
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Aparatur Gampong	3
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Sebelumnya	28
Tabel 3.1	Jumlah Populasi Penelitian.....	27
Tabel 3.2	Skala Pengukuran Kuesioner	35
Tabel 3.3	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	36
Tabel 4.1	Karakteristik Responden	40
Tabel 4.2	Persepsi Responden terhadap Variabel Akuntabilitas Pengolaan Dana Desa.....	42
Tabel 4.3	Persepsi Responden terhadap Variabel Kompetensi Aparatur Desa.....	45
Tabel 4.4	Hasil Pengujian Normalitas.....	47
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Auto Korelasi	48
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Validitas	49
Tabel 4.7	Hasil Pengujian Reliabilitas	50
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Hipotesis	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran	30
------------	--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian.....	58
Lampiran 2	Tabulasi Data Penelitian.....	60
Lampiran 3	Hasil Pengujian Validitas	62
Lampiran 4	Hasil Pengujian Reliabilitas	64
Lampiran 5	Hasil Pengujian Asumsi Klasik	65
Lampiran 6	Hasil Pengujian Hipotesis.....	66
Lampiran 7	Nilai R Tabel	67
Lampiran 8	Nilai Durbin Watson.....	68

***THE EFFECT OF VILLAGE APPARATUS COMPETENCE ON
THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT
IN KUTA ALAM DISTRICT BANDA ACEH CITY***

By:

**Riska Aprilia
NPM. 1802110119**

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of village apparatus competence on village fund management accountability. One independent variable will be tested for its effect on one dependent variable, namely the accountability of village fund management. This study included all elements of the population into observations, as many as 55 respondents. Observations are on the village apparatus in the Kuta Alam sub-district, Banda Aceh City. The analytical method used is simple linear regression. The results of this study found that the competence of the village apparatus had an effect on the accountability of village fund management.

Keywords: village fund management accountability, village apparatus competence.

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

oleh

Riska Aprilia
NPM. 1802110119

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Satu variabel bebas tersebut akan diuji pengaruhnya terhadap satu variabel tidak bebas yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini memasukan semua elemen populasi menjadi pengamatan, yaitu sebanyak 55 responden. Pengamatan yaitu pada aparatur pada desa di kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12) Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat dalam akhir tahun 2017. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, semua akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas yang secara umum diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media

pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga laporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik.

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan *stewardship theory* yaitu manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang *steward* (pemerintah desa) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teori ini berdasarkan asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggungjawab.

Desa-desanya berada di wilayah hukum Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah Kecamatan yang berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa (LAKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban akuntabilitas dana desa yang diberikan kepada masing-masing desa di wilayah Kecamatan Kuta

Alam dalam bentuk Alokasi Dana Gampong (ADG). Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, saat ini terdiri atas 11 desa atau gampong, yaitu Kuta Alam, Beurawe, Keuramat, Laksana, Mulia, Peunayong, Bandar Baru, Kota Baru, Lamdingin, Lambaro Skep dan Lampulo. Adapun tingkat pendidikan apratur gampong dapat dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Gampong

No.	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		Sarjana	Diploma	SLTA	SMP	
1	Keuchik	6	-	5	-	11
2	Sekdes	11	-	-	-	11
3	Bendahara	5	6	-	-	11
4	Sekretariat	5	4	2	-	11
5	Tuha Peut	3	4	4	-	11
	Jumlah	30	14	11	0	55

Sumber : Kecamatan Kuta Alam, (2021)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuta Alam, maka kompetensi aparatur desa perlu juga diperhatikan sehingga dengan adanya kompetensi tersebut akan semakin meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam memahami dan menyiapkan laporan keuangan desa secara transparan, akuntabel, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan temuan-temuan yang ada. Adapun aparatur perangkat desa terdiri atas: Keuchik, sekdes, Keuangan, Sekretariat dan tuha peut. Dalam hal ini aparatur desa terlibat dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kompetensi aparatur desa di Kecamatan Kuta alam yang berpendidikan sarjana sebanyak 30 orang, pendidikan Diploma sebanyak 14 orang dan yang berpendidikan SMA sebanyak 11 orang. Dari 30 orang aparatur gampong yang berpendidikan sarjana, hanya 8 orang yang berlatar belakang sarjana akuntansi.

Tentunya latar belakang pendidikan sangat mendukung kompetensi dari aparatur desa. Melaksanakan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di kec. Kuta Alam.

Dengan tidak berlatar belakang akuntansi maka tingkat pengetahuan aparatur desa sangat terbatas dalam memahami ketentuan dan prinsip dasar akuntansi. Maka dalam hal ini perangkat desa memerlukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nya sehingga dapat melakukan akuntabilitas pengelolaan Dana desa dengan lebih baik.

Alokasi Dana Gampong, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dikelola oleh masing-masing gampong dalam rangka pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (*Musrenbangdes*) .

Pada sistem yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang berpacu pada potensi lokal. Secara esensi kemandirian harus dimulai dari level pemerintahan yang paling bawah yaitu desa. Dengan ruang lingkup yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat setiap kebutuhan yang harus lebih

diprioritaskan. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembagunan desa adalah dengan mengeluarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Untuk menciptakan akuntabilitas penggunaan dana desa pemerintah menyediakan alat bantu software komputer, agar pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskedes), dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap desa diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Mada et al. (2017) menjelaskan bahwa kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang, serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa harus didukung dengan sumber daya yang memadai agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau kompetensi maka mustahil bagi organisasi dapat mencapai tujuan. Sumber daya sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada (Hilman, 2016). Kompetensi sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi (Ilhami, 2019). Kompetensi Sumber daya manusia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Aryani, 2020).

Akuntabilitas itu sendiri dalam konteks pengelolaan keuangan menurut Adisasmita, (2018). merupakan pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber dana publik dari organisasi sektor publik pada saat penyelenggaraan kegiatan secara efektif, efisien, dan ekonomis sehingga dapat terhindar dari pemborosan dana yang akan berdampak pada tindakan penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan hal ini akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa merupakan cerminan bagi aparatur desa dalam mengukur seberapa besarnya kesuksesan pemerintah desa dalam mengelola dana desa tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh aparatur desa tersebut..

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2021**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian terdiri atas 2 aspek yaitu

a. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya manajemen dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Tahun 2021
2. Dapat menjadi bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya terutama berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

b. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam menyikapi penggunaan keuangan negara khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana di desa di masa yang akan datang.
2. Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah dengan diketahui tentang dampak kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dapat menjadi rujukan bagi pimpinan organisasi untuk pengambilan keputusan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu hanya pada lingkup kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Untuk menyelenggarakan otonomi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa. Menurut Ilhami (2019) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintah yang semula sentralis dan dominan, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Prinsip-prinsip dalam mengelola Alokasi Dana Desa adalah partisipatif, bertanggungjawab, terbuka serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena diperlukan adanya pengawasan dan evaluasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa agar pelaksanaan alokasi dana desa dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Riska (2020) alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil Pajak daerah dan bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Tujuan alokasi dana desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Medorong peningkatan swadaya gotong royong

Adanya alokasi dana desa ini selain memberikan manfaat untuk desa juga memberikan manfaat tersendiri bagi kabupaten/kota antara lain:

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga dengan membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota.
2. Kabupaten/Kota dapat lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang

Alokasi Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang besarnya telah tertuang dalam peraturan desa anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG). Dalam hal ini kepala desa mempunyai peran sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan alokasi dana desa sehingga aktivitas dalam pembiayaan dengan uang alokasi dana desa ini harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Mengenai pembahasan alokasi dana tersebut, menurut pandangan pandangan Maulana & Napisah (2021) bahwa

sebenarnya konsep alokasi dana desa tersebut bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa.

Dalam hal alokasi dana desa tersebut bahwa secara keseluruhan kebijakan disamping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun juga bisa mendukung jalannya demokrasi desa dan sekaligus memperkuat otonomi masyarakat dalam pengadaan pemerintahan dan pembangunan desa. Maka dengan kemunculannya tersebut pemerintah desa akhirnya diminta untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pemerintah desa. Memang pada dasarnya kebijakan alokasi dana desa tersebut telah dipogramkan oleh kabupaten atau kota untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat desa serta untuk memenuhi hak-hak desa.

2.1.2. Kompetensi Aparatur Desa

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Maulana & Napisah (2021) menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan atau situasi. Sedangkan menurut Mada, Kalangi, & Gamaliel (2019) kompetensi merupakan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki atau dicapai seseorang, yang menjadi bagian dari dirinya, sehingga bisa menjalankan penampilan kognisi, afeksi dan perilaku psikomotorik tertentu. Kemuaian Ilhami, (2019) menyatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan atau pegawai yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, dan efisien.

Pengertian kompetensi menurut Adisasmita, (2018) adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang ditempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan individu yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja, dan mencakup semua aspek catatan manajemen kinerja, keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi, dan pengembangan. Menurut Syahbrani, (2019). sumber daya manusia didefinisikan sebagai individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka pencapaian startegi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau potensi, maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat di simpulkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang dimiliki.

Pada organisasi sektor publik, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan dari keberhasilan mengelola sumber daya manusia atau aparatur yang terdapat pada organisasi tersebut. Aparatur pemerintahan baik di wilayah pusat

maupun daerah merupakan penggerak dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Jika kompetensi aparatur di suatu daerah baik, maka pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara baik pula. Jika kompetensi aparatur tidak baik, maka pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Adisasmita (2018) mengungkapkan bahwa pemerintah harus memiliki sumber daya yang kompeten, dimana didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta memiliki pengalaman yang baik dalam bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang berlaku. Aparatur pemerintah daerah yang kompeten dapat memahami dan menerapkan logika akuntansi dengan baik dan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.

Jadi, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa kompetensi aparatur merupakan sesuatu yang dapat terukur, diobservasi, diprediksikan, dan dievaluasi yang terefleksikan dalam perilaku kerja seseorang yang meliputi pengetahuan yang baik mengenai akuntansi, keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugas, sikap yang baik sebagai seorang aparatur pemerintah daerah, dan memiliki latar belakang serta pengalaman yang baik dalam bidang akuntansi agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara baik dan tepat sasaran. Kompetensi merupakan faktor penentu bagi seseorang untuk menampilkan kinerja terbaiknya. Pada situasi kolektif di dalam organisasi, kompetensi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan organisasi tersebut dalam menghadapi

perubahan yang terjadi. Berdasarkan penjelasan ini juga menggambarkan bahwa kompetensi aparatur merupakan faktor penentu dari keberhasilan dari suatu organisasi termasuk dalam akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip Kompetensi Aparatur

Prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan dalam peningkatan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah menurut Pemendagri No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Harus selalu berorientasi pada kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Dapat mendorong dalam peningkatan kinerja organisasi dan pengembangan karir bagi aparatur pemerintah.
- 3) Pengimplementasiannya harus berbasis pada kompetensi kerja penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) Aparatur, pemerintah dan masyarakat harus mempunyai tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Pengembangan profesionalisme aparatur haruslah secara berkelanjutan.
- 6) Pengimplementasian penyelenggaraan pemerintah haruslah secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

2.1.2.3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi

Adisasmita, (2018) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut

1. Keyakinan dan Nilai

Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Untuk itu, setiap orang harus berpikir positif baik tentang dirinya maupun terhadap orang lain dan menunjukkan ciri orang yang berpikir kedepan.

2. Keterampilan

Keterampilan memainkan peran dikebanyakan kompetensi. Pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan dengan kompetensi dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan kompetensi individual.

3. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi dihadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya.

4. Karakteristik Kepribadian

Kepribadian dapat memengaruhi keahlian manajer dan pekerja dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dan membangun hubungan.

5. Motivasi

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Apabila manajer dapat mendorong motivasi pribadi seorang pekerja, kemudian menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis, mereka akan sering menemukan

peningkatan penguasaan dalam sejumlah kompetensi yang memengaruhi kinerja.

6. Isu Emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif.

7. Kemampuan Intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis.

8. Budaya Organisasi

Budaya organisasi memengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam berbagai kegiatan.

2.1.2.4 Indikator Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Adisasmita, (2018). menjelaskan bahwa terdapat lima komponen dalam kompetensi, yaitu :

1. Motif (Motives)

Komponen ini berkaitan dengan sesuatu yang secara terus menerus dipikirkan atau diinginkan seseorang secara konsisten sehingga ia bertindak. Motif menggerakkan, mengarahkan dan memilih perilaku terhadap tindakan atau tujuan dan lainnya.

2. Sifat (*Trait*)

Komponen ini berkaitan dengan watak yang membuat aparatur untuk berperilaku atau bagaimana aparatur merespon sesuatu dengan cara tertentu.

Kontrol emosi dan inisiatif adalah respon yang konsisten terhadap situasi. Mengontrol emosi dan bertindak untuk memecahkan masalah merupakan kompetensi sifat yang baik terhadap seorang aparatur.

3. Konsep Diri (*Self-Concept*)

Konsep diri berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seorang aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Pengetahuan (*Knowledge*)

Komponen ini berkaitan dengan informasi yang dimiliki oleh aparatur untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidangnya. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang aparatur dapat menentukan berhasil atau tidaknya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Jika seorang aparatur memiliki pengetahuan yang memadai maka akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tempat dia bekerja.

5. Keterampilan (*Skill*)

Komponen ini berkaitan dengan suatu upaya seorang aparatur untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara baik dan maksimal, seperti keterampilan dalam bekerjasama dalam tim, keterampilan dalam memahami dan memotivasi orang lain.

6. Bidang Kerja

Komponen bidang kerja aparatur penyelenggara pelayanan publik di masing-masing desa bekerja pada bidang yang sesuai dengan keterampilannya masing-masing

Kemudian Riska (2020). terdapat 3 (tiga) komponen utama pembentukan kompetensi SDM. Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan cara yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Merupakan informasi yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang atau pendidikan yang telah ditempuh. Pengetahuan yang dimiliki seseorang turut meningkatkan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Kemampuan (*skill*)

Merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.

3. Sikap (*attitude*)

Merupakan pola tingkah laku seorang karyawan atau pegawai sesuai dengan peraturan karyawan. Apabila karyawan mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengertian akuntabilitas menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2018:27), akuntabilitas merupakan kewajiban dari pihak pemegang amanah (*agent*) untuk menyajikan, melaporkan, mengungkapkan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang merupakan tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (*principal*) yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban. Menurut Adisasmita, (2018:34) akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban dari pihak yang mengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang berhak dan berwenang atas tindakan dan keputusan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan menurut Hilman, (2016) merupakan pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber dana publik dari organisasi sektor publik pada saat penyelenggaraan kegiatan secara efektif, efisien, dan ekonomis sehingga dapat terhindar dari pemborosan dana yang akan berdampak pada tindakan penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengertian akuntabilitas menurut Adisasmita,(2018). adalah pengendalian terhadap organisasi publik untuk dijadikan landasan dalam memberikan penjelasan terkait organisasional untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas tindakan-tindakan dari organisasi publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik itu pihak internal maupun eksternal.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, karena merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*Good Governance*). Penerapan akuntabilitas ini juga diperlukan untuk membuktikan bahwa pemerintah daerah tersebut telah melaksanakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah secara jujur, bersih, dan terhindar dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan hal ini akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Maka Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk menyempurnakan masalah akuntabilitas ini dengan menerbitkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan cerminan bagi pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahannya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian Krina, (2019) menjelaskan akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Hilman (2016) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai,

dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas secara periodik.

Menurut Hilman, (2016) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Madiasmo (2018) akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas seperti yang diungkapkan oleh Krina (2019) dinyatakan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan atas aktivitas yang dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mempertanggungjawabkan.

2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Madiasmo (2018:47) menjelaskan bahwa terdapat 4 indikator yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan petanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil

Sedangkan menurut Hilman (2016:37) menyatakan bahwa indikator pengurukan variabel akuntabilitas pada sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

- a. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

- b. Pelaksanaan organisasi yang sehat untuk menghindari penyalahgunaan jabatan.

2. Akuntabilitas Manajerial

- a. Pengelolaan kegiatan organisasi secara efektif, ekonomis, dan efisien
- b. Bertanggungjawab terhadap inefisiensi pelaksanaan program.

3. Akuntabilitas Program

- a. Pemilihan alternatif program yang memberikan hasil optimal.
- b. Bertanggung jawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
- c. Pelaksanaan program mendukung pencapaian tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

- a. Bertanggung jawab terhadap putusan yang telah diambil beserta dampaknya.
- b. Adanya perhatian pada sasaran terhadap pelaksanaan putusan

5. Akuntabilitas finansial

- a. Pengelolaan uang publik secara ekonomis, efektif dan efisien
- b. Penghindaran kebocoran, pemborosan, dan korupsi

Menurut Krina, (2019:33) menyatakan bahwa indikator pengukuran akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan,

korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian Sri Rahayu Maulana, (2021) dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran). Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (2) Terdapat Pengaruh Pengendalian Internal, terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (3) Secara Simultan Terdapat Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian Ni Putu Dessy Eka Aryani, (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa dan keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian sebelumnya yang konsisten penelitian ini adalah penelitian Riska (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparatur, Transparansi, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Aceh. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial komitmen organisasi dan kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan transparansi dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian secara simultan komitmen organisasi, kompetensi aparatur, transparansi dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Mada, Kalangi, & Gamaliel, (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian membuktikan bahwa besarnya pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 75,10%. Sedangkan sisanya sebesar 24,90% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Implikasi temuan penelitian ini adalah untuk mendorong pengelolaan dana desa yang akuntabel melalui peningkatan kompetensi aparat

pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ilhami, (2019), dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Se Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara). Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan dana desa. Variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan dana desa. Sedangkan variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan dana desa. Variabel partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan dana desa di kecamatan Kedung kabupaten Jepara. Sehingga, saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu perangkat desa dan masyarakat harus saling berkomunikasi dan berkerjasama agar memiliki akuntabilitas laporan dana desa.

Adapun ringkasan hasil penelitian sebelumnya dapat dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2-1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penelitian/ Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Maulana & Napisah. (2021)	Kuantitatif Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Kompetensi Aparatur Desa Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Penelitian	Lokasi Penelitian Responden
2	Aryani, Werastuti,	Kuantitatif Regresi	Hasil penelitian membuktikan bahwa	Kompetensi aparatur	Pengoptimalan pengelolaan

	& Adiputra (2020).	Linier Berganda	kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, efektivitas kinerja		dana desa efektivitas kinerja
3	Riska, (2020).	Regresi Linier Berganda	Secara simultan komitmen organisasi, kompetensi aparatur, transparansi dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Kompetensi aparatur akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan efektivitas pengendalian internal
4	Mada, Kalangi, & Gamaliel, (2019)	Kuantitatif	Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 75,10%.	Kompetensi aparat pengelola dana desa akuntabilitas pengelolaan dana desa	Komitmen organisasi
5	Ilhami, (2019)	Regresi Linier Berganda	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan dana desa. Variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan dana desa.	Kompetensi SDM akuntabilitas laporan dana desa	Sistem pengendalian internal

2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1. Hubungan Kompetensi Aparatur Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Suatu organisasi membutuhkan sumber daya manusia sebagai pelaksana atau penggerak untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan aspek yang penting dalam sebuah organisasi. Jika suatu organisasi mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten, maka organisasi tersebut

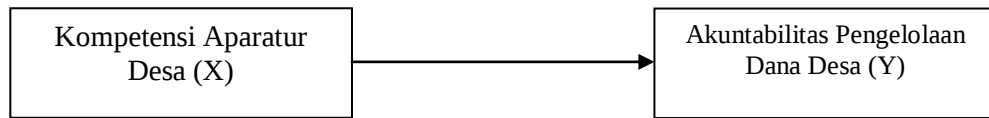
dengan mudah mencapai tujuannya. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan tugas tidak berkualitas, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi dalam organisasi.

Pengertian kompetensi menurut Riska (2020) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut Ilhami (2019) sumber daya manusia didefinisikan sebagai individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka pencapaian strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau potensi, maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Hasil penelitian oleh Mada, Kalangi & Gamaliel, (2017) mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara faktor kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas laporan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhami, (2019) yang menyatakan bahwa faktor kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan dana desa di Kabupaten Karawang. Senada dengan penelitian tersebut, Aryani, Werastutui, & Adiputra (2020) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan dana desa di kota Denpasar.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai keseluruhan rangkaian penelitian ini maka disusunlah kerangka penelitian yang terlihat pada Gambar 2.1

Gambar 2-1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Dikembangkan oleh penulis berdasarkan penelitian sebelumnya (2021)

2.4. Hipotesis

Menurut Sugiono (2014:64) hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dikemukakan pada Bab I. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_o : Tidak terdapat pengaruh kompetensi Aparatur Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

H_a : Terdapat pengaruh kompetensi Aparatur Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran dan Bougie (2013:152) desain penelitian adalah serangkaian pilihan pengambilan keputusan rasional, yang berkaitan dengan tujuan studi, letaknya, jenis yang sesuai untuk penelitian, tingkat manipulasi dan kontrol peneliti, aspek temporal dan level analisis data. Desain penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel bebas dengan variabel terikat.

3.1.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hubungan kausal yaitu suatu tipe hubungan antara variabel yang menjelaskan pengaruh variabel independen atau tipe hubungan yang menjelaskan sebab akibat antar variabel-variabel (Sekaran dan Bogie 2013:154). Penelitian ini menjelaskan pengaruh kompetensi baik secara bersama-sama maupun parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

3.1.3. Tingkat Intervensi Penelitian

Dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk melakukan intervensi dan manipulasi data untuk mempengaruhi hasil, tingkat intervensi penelitian ini adalah minimal.

3.1.4. Situasi Penelitian (*study setting*)

Penelitian ini menguji hipotesis data yang diperlukan dengan data dari lingkungan alami. Berdasarkan hal tersebut maka situasi penelitian ini tidak diatur/direncanakan.

3.1.5. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kompetensi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Unit analisis tersebut terdiri dari karakteristik responden, kompetensi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa

3.1.6. Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengeumpulan data pada penelitian ini adalah metode *one shoot*. Desain penelitian ini adalah desain one shot case study, jenis one-shot case study dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan pengukuran dan nilai ilmiah suatu desain penelitian.

Desain penelitian one shot case study tidak dilakukan pretest pada subjek penelitian. Subjek diberi treatment pada pengisian kuesioner dengan metode demonstrasi, kemudian subjek diamati dengan menggunakan tes kinerja.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2014:7), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak (*random sampling*), pengumpulan data

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penelusuran pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh didapatkan dengan menggunakan metode survei, dimana menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data survei ini, dimana penelitian dilakukan dalam ruang alamiah atau bukan buatan dan peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiono (2014:6) bahwa, metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan instrumen kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintahan gampong baik dari unsur pemerintah gampong maupun unsur dari tuha peut yang berdomisili di lingkungan Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang berjumlah 55 orang.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sensus, yaitu mengikut sertakan seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri atas (1) Keuchik, (2) Sekdes, (3) Bendahara, (4) Sekretariat, (5), Tuha Peut, seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

Gampong	Jabatan Aparatur Gampong					Jumlah
	Keuchik	Sekdes	Bendahara	Sekretariat	Tuha Peut	
Kuta Alam	1	1	1	1	1	5
Beurawe	1	1	1	1	1	5
Keuramat	1	1	1	1	1	5
Laksana	1	1	1	1	1	5
Mulia	1	1	1	1	1	5
Peunayong	1	1	1	1	1	5
Banda Baru	1	1	1	1	1	5
Kota Baru	1	1	1	1	1	5
Lamdingin	1	1	1	1	1	5
Lambaro Skep	1	1	1	1	1	5
Lampulo	1	1	1	1	1	5
Jumlah	11	11	11	11	11	55

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di dalam membahas permasalahan ini, penulis melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data melalui:

1. Wawancara yaitu penulis melakukan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan komunikasi langsung dengan pihak aparaturnya gampong di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
2. Kuisioner, yaitu penulis melakukan penyebaran daftar pertanyaan tertulis untuk mendapatkan data-data yang dapat mendukung penelitian kepada setiap responden.

3.4 Skala Pengukuran

Dari hasil yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dalam bentuk kualitatif dikomposisikan terlebih dahulu agar menjadi data yang kuantitatif. Adapun nilai kuantitatif yang dikomposisikan dilakukan dengan menggunakan Skala Likert dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Kuisioner

No.	Keterangan	Skor
1.	Sangat Tidak Setuju	1
2.	Tidak Setuju	2
3.	Kurang Setuju	3
4.	Setuju	4
5.	Sangat Setuju	5

3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Dalam rangka menguji hipotesis yang telah disebutkan sebelumnya, variabel-variabel yang diidentifikasi tersebut perlu didefinisikan supaya variabel yang ada dapat dioperasikan. Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2009:38) merupakan “segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Sekaran dan Bougie (2013) membagi variabel yang akan diteliti menjadi dua yaitu variabel bebas (*independent variable*), variabel terikat (*dependent variable*). Dalam penelitian ini menggunakan dua macam variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Tabel. 3.3.
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Item Pertanyaan
Dependent						
1	Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)	Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber keuangan publik pada saat penyelenggaraan kegiatan secara efektif, efisien, dan ekonomis sehingga dapat terhindar dari pemborosan dana. (Krina, 2013)	1. Pengambilan keputusan 2. Tersedianya informasi 3. Visi dan misi organisasi 4. Target operasional 5. Bentuk tanggung jawab 6. Mendapatkan informasi 7. Mekanisme Pengaduan	1 – 5	Likert	A1-A8

			8. Tersedianya sistem informasi (Krina, 2013)			
Independent						
2	Kompetensi Aparatur Desa (X)	Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan atau pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien Spencer & Spencer, (2013)	1. Motif 2. Sifat 3. Konsep Diri 4. Pengetahuan 5. Keterampilan 6. Keseuaian pekerjaan. Spencer & Spencer, (2013)	1 – 5	Likert	B1-B6

3.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

3.6.1 Pengujian Validitas

Validitas menunjukkan suatu alat pengukur untuk mengukur apa yang ingin diukur (Gujarati,2018:124), penentuan validitas didasarkan atas perbandingan nilai korelasi yang diperoleh antara skor item dengan skor total item, dengan nilai kritis product moment (r_{Tabel}). Apabila nilai korelasi hitung (r_{Hitung}) lebih besar dibandingkan dengan nilai (r_{Tabel}) pada tingkat keyakinan 95% dapat diartikan bahwa item-item pernyataan tersebut valid.

3.6.2 Pengujian Reliabilitas

Pengertian reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Pada dasarnya bukanlah alat ukurnya yang reliabel,

melainkan datanya karena yang kita uji adalah data bukan alat ukur. Pengertian alat ukur yang reliabel berarti bahwa alat ukur tersebut mampu mengungkapkan data yang cukup dapat dipercaya. Namun untuk meningkatkan istilah, sering dinyatakan bahwa alat ukurnya reliabel.

Adapun metode-metode untuk mengukur reliabilitas yaitu Spearman-Brown, Flanagan, Rulon, Hoyt, dan Alpha Cronbach (Gujarati, 2018:124). Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan metode Alpha Cronbach yang lazim digunakan dalam penelitian asosiatif. Koefisien yang diterima diatas 0,6 (Gujarati, 2018:124).

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini dilakukan untuk mengetahui distribusi normal terhadap masing-masing variabel indenpenden, dependen atau kedua variabel. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Data dikatakan berdistribusi normal apabila probabilitas Kolmogorov Smirnov $Z > 0,05$ (Malhotra, 2012:132).

3.7.2. Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi adalah gangguan pada fungsi regresi yang berupa korelasi diantara faktor gangguan. Pengujian ada tidaknya autokorelasi yang paling banyak digunakan adalah uji *Durbin Watson* (uji DW) pada tingkat signifikansi 5%. Uji ini menghasilkan nilai DW hitung dan nilai DW tabel (dl & du). Aturan pengujiannya adalah (Santoso, 2009:58):

- a. $DW < dl$ berarti ada autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan.

- b. $dl < DW < du$ berarti ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik.
- c. $du < DW < 4-du$ berarti tidak ada masalah autokorelasi.
- d. $4-du < DW < 4-dl$ berarti ada masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik.
- e. $4-dl < DW$ berarti ada masalah autokorelasi serius.

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Regresi Linear Sederhana

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier sederhana dengan formula sebagai berikut: (Sugiono (2014:154)

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y	=	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
a	=	Konstanta
b	=	Koefisien Regresi X
X	=	Kompetensi Aparatur Desa
e	=	<i>Error term</i>

Berikutnya akan dianalisis koefisien Korelasi (r) dan koefisien Determinasi ($D = R^2 \times 100\%$).

3.8.2 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen digunakan uji Koefisien beta, ketika nilai $Betha = 0$, maka H_0 diterima. Sebaliknya ketika koefisien $betha \neq 0$, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima. dengan hipotesis:

H_0 : Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

H_a : Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian meliputi karakteristik responden, persepsi responden terhadap variabel, hasil pengujian keandalan data, dan hasil pengujian hipotesis. Rangkaian paparan berikut ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

4.1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden akan menampilkan informasi terkait dengan jenis kelamin, status perkawinan, usia responden, pendidikan terakhir, dan masa kerja. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

1)	Jenis Kelamin		Jumlah	%
	1)	Laki-laki	51	92,72%
	2)	Perempuan	4	7,28%
	Jumlah		55	100%
2)	Status Perkawinan			
	1)	Kawin	41	74,55%
	2)	Belum Kawin	12	21,82%
	3)	Janda / Duda	2	3,63%
	Jumlah		55	100%

Tabel 4.1 –Lanjutan

Karakteristik		Jumlah	%	
3)	Usia Responden			
	1)	< 20 Tahun	1	1,81%
	2)	20 – 29 Tahun	2	3,64%
	3)	30 – 39 Tahun	7	12,73%
	4)	40 – 49 Tahun	23	41,82%
	5)	> 49 Tahun	22	40%
	Jumlah		55	100%
4)	Pendidikan Terakhir			
	1)	≤ SMA	11	20%
	2)	Diploma / Akademi	14	25,45%
	3)	Sarjana	30	54,54%
	4)	Magister	0	0,0%
	5)	Doktor	0	0,00%
	Jumlah		55	100%
5)	Masa Kerja			
	1)	< 1 tahun	8	14,55%
	2)	1-5 tahun	38	69,09%
	3)	6-10 tahun	5	9,09%
	4)	11-15 tahun	4	7,27%
	5)	> 16 tahun	0	0,00%
	Jumlah		55	100%

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat jenis kelamin responden laki-laki sebanyak 51 orang, dan perempuan sebanyak 4 orang. Responden laki-laki lebih dominan dalam pengamatan. Kemudian status perkawinan, kawin sebanyak 41 orang, belum kawin 12 orang, dan janda/duda sebanyak 2 orang. Responden yang berstatus kawin lebih dominan dalam pengamatan.

Selanjutnya usia responden <20 tahun sebanyak 1 orang, 20-29 tahun sebanyak 2 orang, 30-39 tahun sebanyak 7 orang, 40-49 tahun sebanyak 23 orang, dan >49 tahun sebanyak 22 orang. Usia responden 40-49 tahun lebih mendominasi dalam pengamatan. Selanjutnya pendidikan terakhir SMA 11 orang, Diploma/Akademi 14 orang, sarjana 30 orang, Magister 0 orang, Doktor 0 orang. Responden Sarjana lebih dominan dalam pengamatan. Yang terakhir adalah karakteristik masa kerja <1 tahun 8 orang, 1-5 tahun 38 orang, 6-10 tahun 5 orang, 11-15 tahun 4 orang, dan >16 tahun 0 orang. Masa kerja 1-5 tahun lebih dominan dalam pengamatan.

4.1.2 Persepsi Responden terhadap Variabel Penelitian

4.1.2.1 Persepsi Responden terhadap Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Persepsi responden terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Persepsi Responden terhadap Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No.	Pertanyaan	Alternatif Pilihan Jawaban					Rata-rata
		STS	TS	KS	S	SS	
1.	Pengambilan keputusan keuangan sudah memenuhi standar etika, nilai-nilai yang berlaku, dan prinsip administrasi yang benar	0	1	12	25	17	4,05
2.	Semua informasi yang berkaitan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program tersedia dengan lengkap dan akurat	1	3	11	24	16	3,39
3.	Setiap kegiatan/program yang diambil mempunyai sasaran yang jelas dan telah sesuai dengan visi dan misi organisasi sektor publik	1	0	6	32	16	4,13
4.	Target operasional dan prioritas program dianggap layak dan konsisten	1	0	15	30	9	3,84

Tabel 4.2 - Lanjutan

No.	Pertanyaan	Alternatif Pilihan Jawaban					Rata-rata
		STS	TS	KS	S	SS	
5.	Adanya bentuk tanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan keputusan keuangan melalui media massa	0	0	0	16	39	4,71
6.	Adanya kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang jelas atas kebijakan atau program yang telah dilaksanakan	0	1	12	25	17	4,05
7.	Adanya mekanisme untuk merespon pengaduan dari masyarakat berkaitan penggunaan dana desa	1	3	11	24	16	3,93
8.	Tersedianya sistem informasi untuk mengevaluasi kinerja aparatur desa dan memantau kegiatan atau program yang telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis	1	0	6	32	16	4,13
Rata-Rata Keseluruhan							4,10

Berdasarkan Tabel 4.2, terlihat persepsi responden untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Indikator yang pertama yaitu pengambilan keputusan memperoleh nilai rata-rata 4,05. Nilai ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju dan berpersepsi bahwa pengambilan keputusan keuangan sudah memenuhi standar etika, nilai-nilai yang berlaku, dan prinsip administrasi yang benar. Indikator yang kedua adalah tersedianya informasi memperoleh nilai rata-rata 3,93. Nilai ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju dan berpersepsi bahwa semua informasi yang berkaitan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program tersedia dengan lengkap dan akurat.

Indikator ketiga adalah visi dan misi organisasi memperoleh nilai rata-rata 4,13. Nilai ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju dan berpersepsi bahwa

setiap kegiatan/program yang diambil mempunyai sasaran yang jelas dan telah sesuai dengan visi dan misi organisasi sektor publik. Indikator keempat adalah target operasional memperoleh nilai rata-rata 3,84. Nilai ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju dan berpersepsi bahwa target operasional dan prioritas program dianggap layak dan konsisten. Indikator kelima adalah bentuk tanggung jawab memperoleh nilai rata-rata 4,71. Nilai ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju dan berpersepsi bahwa adanya bentuk tanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan keputusan keuangan melalui media massa.

Indikator keenam adalah mendapatkan informasi memperoleh nilai rata-rata 4,05. Nilai ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju dan berpersepsi bahwa adanya kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang jelas atas kebijakan atau program yang telah dilaksanakan. Indikator ketujuh adalah mekanisme pengaduan memperoleh nilai rata-rata 3,93. Nilai ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju dan berpersepsi bahwa adanya mekanisme untuk merespon pengaduan dari masyarakat berkaitan penggunaan dana desa. Indikator kedelapan adalah tersedianya sistem informasi memperoleh nilai rata-rata 4,13. Nilai ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju dan berpersepsi bahwa tersedianya sistem informasi untuk mengevaluasi kinerja aparatur desa dan memantau kegiatan atau program yang telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.

4.1.2.2 Persepsi Responden terhadap Variabel Kompetensi Aparatur Desa

Persepsi responden terhadap variabel kompetensi aparatur desa secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Persepsi Responden terhadap Variabel Kompetensi Aparatur Desa

No.	Pertanyaan	Alternatif Pilihan Jawaban					Rata-rata
		STS	TS	KS	S	SS	
1.	Pekerjaan yang diberikan kepada anda merupakan tanggungjawab yang harus diselesaikan dengan baik	0	0	11	33	11	4,00
2.	Anda selalu siap membantu rekan kerja atau staf dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan	0	0	0	16	39	4,71
3.	Meskipun sedang berada dalam tekanan untuk segera menyelesaikan pekerjaan, anda selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan atau tindakan	0	3	15	24	13	3,85
4.	Anda memiliki pengetahuan teknis yang cukup untuk menjalankan tugas	0	0	20	30	5	3,73
5.	Anda mampu mengembangkan kreativitas dalam mengimplementasikan Panduan kerja (SOP).	4	0	27	18	6	3,40
6.	Aparatur di masing-masing desa anda bekerja pada bidang yang sesuai dengan keterampilannya masing-masing	0	0	11	33	11	4,00
Rata-Rata Keseluruhan							3,95

Berdasarkan Tabel 4.3, terlihat persepsi responden untuk variabel kompetensi aparatur desa. Indikator yang pertama yaitu motif memperoleh nilai rata-rata 4,00. Nilai ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju dan berpersepsi bahwa pekerjaan yang diberikan kepada anda merupakan tanggungjawab yang harus diselesaikan dengan baik. Indikator yang kedua yaitu sifat memperoleh nilai rata-rata 4,71. Nilai ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju dan berpersepsi bahwa

selalu siap membantu rekan kerja atau staf dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan.

Indikator yang ketiga yaitu konsep diri memperoleh nilai rata-rata 3,85. Nilai ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju dan berpersepsi bahwa meskipun sedang berada dalam tekanan untuk segera menyelesaikan pekerjaan, selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan atau tindakan. Indikator yang keempat yaitu pengetahuan memperoleh nilai rata-rata 3,73. Nilai ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju dan berpersepsi bahwa memiliki pengetahuan teknis yang cukup untuk menjalankan tugas. Indikator yang kelima yaitu keterampilan memperoleh nilai rata-rata 3,40. Nilai ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju dan berpersepsi bahwa mampu mengembangkan kreativitas dalam mengimplementasikan panduan kerja (SOP). Indikator yang keenam yaitu kesesuaian pekerjaan memperoleh nilai rata-rata 4,00. Nilai ini menunjukkan bahwa responden umumnya setuju dan berpersepsi bahwa aparatur di masing-masing desa bekerja pada bidang yang sesuai dengan keterampilannya masing-masing.

4.1.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

4.1.3.1 Normalitas

Hasil pengujian normalitas bertujuan untuk melihat normal tidaknya data yang akan di analisis. Uji statistik yang umum digunakan untuk menguji normalitas adalah *Kolmogorov-Smirnov Test*, yaitu dengan melihat *significant (2-tailed)* masing-masing

variabel bernilai lebih dari *level of significant* 5% ($> 0,05$) (Santoso, 2009:55). Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Aparatur Desa
N		55	55
Normal Parameters ^a	Mean	18.56	18.06
	Std. Deviation	2.567	2.075
Most Extreme Differences	Absolute	0.212	0.316
	Positive	0.212	0.116
	Negative	0.204	0.083
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0.979	0.966
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0.319	0.215
a. Test distribution is Normal.			

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat semua nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* untuk semua variabel lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data sudah memenuhi kriteria normalitas data. Sehingga data sudah dapat dipakai untuk pengujian selanjutnya.

4.1.3.2 Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi adalah gangguan pada fungsi regresi yang berupa korelasi diantara faktor gangguan. Pengujian ada tidaknya autokorelasi yang paling banyak digunakan adalah uji *Durbin Watson* (uji DW) pada tingkat signifikansi 5%.

Uji ini menghasilkan nilai DW hitung dan nilai DW tabel (dl & du). Aturan pengujiannya adalah (Santoso, 2009:58):

- DW<dl berarti ada autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan.
- dl<DW<du berarti ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik.
- du<DW<4-du berarti tidak ada masalah autokorelasi.
- 4-du<DW<4-dl berarti ada masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik.
- 4-dl<DW berarti ada masalah autokorelasi serius.

Secara ringkas hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.138 ^a	0.019	0.001	3,670	1.82
a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur Desa					
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa					

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat nilai Durbin Watson sebesar 1,826. Kemudian nilai ini dimasukan dalam kriteria. Rumusnya $du < DW < 4-du$. Berdasarkan Tabel Durbin Watson pada Lampiran, $du = 1,43$, maka $4-du = 2,57$. Sehingga $1,43 < 1,82 < 2,57$. Artinya tidak ada masalah autokorelasi, sehingga data sudah dapat dipakai untuk pengujian selanjutnya.

4.1.4 Hasil Pengujian Keandalan Data

4.1.4.1 Hasil Pengujian Validitas

Hasil Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen mampu mengukur atribut yang seharusnya diukur (Santoso, 2010:23). Kriteria yang digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu item pertanyaan adalah jika nilai $r_{xy} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan yang diuji validitasnya tersebut dinyatakan valid. Secara ringkas hasil pengujian validitas dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Validitas

No	Item	Nilai R_{hitung} (Lampiran 3)	Nilai R_{tabel} (Lampiran 7)	Perbandingan	Keterangan
1.	A1	0,490	0,2656	$0,490 > 0,2656$	Valid
2.	A2	0,762		$0,762 > 0,2656$	Valid
3.	A3	0,612		$0,612 > 0,2656$	Valid
4.	A4	0,699		$0,699 > 0,2656$	Valid
5.	A5	0,557		$0,557 > 0,2656$	Valid
6.	A6	0,490		$0,490 > 0,2656$	Valid
7.	A7	0,762		$0,762 > 0,2656$	Valid
8.	A8	0,612		$0,612 > 0,2656$	Valid
9.	B1	0,706		$0,706 > 0,2656$	Valid
10.	B2	0,529		$0,529 > 0,2656$	Valid
11.	B3	0,480		$0,480 > 0,2656$	Valid
12.	B4	0,600		$0,600 > 0,2656$	Valid
13.	B5	0,538		$0,538 > 0,2656$	Valid
14.	B6	0,706		$0,706 > 0,2656$	Valid

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat semua nilai R_{hitung} lebih besar dari nilai R_{tabel} ($R_{hitung} > R_{tabel}$). Hal ini menunjukkan instrumen penelitian yaitu berupa butir-butir kuesioner telah valid. Sehingga sudah bisa dipakai untuk pengujian selanjutnya.

4.1.4.2 Hasil Pengujian Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi suatu kuesioner (Sekaran, 2006:63). Uji reliabilitas adalah uji yang

digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Santoso, 2010:45). Kriteria untuk menentukan reliabel tidaknya suatu kuesioner dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang disarankan oleh Santoso (2010:48), yaitu jika suatu kuesioner memiliki $\alpha > 0,60$ maka dikatakan kuesioner tersebut reliabel. Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Reliabilitas

No.	Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> (Lampiran 4)	Perbandingan	Keterangan
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,728	$0,728 > 0,60$	Realibel
2.	Kompetensi Aparatur Desa	0,710	$0,710 > 0,60$	Realibel

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat semua nilai *Cronbach's Alpha* variabel penelitian lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa semua instrumen telah memenuhi kriteria reliabilitas. Artinya instrumen sudah dapat dipakai untuk pengujian selanjutnya.

4.1.5 Hasil Pengujian Hipotesis

4.1.5.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengujian hipotesis bertujuan untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah diajukan. Secara ringkas, hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Hipotesis

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.542	5.168		5.329	0.000
	Kompetensi Aparatur Desa	0.220	0.217	0.138	1.015	0.315
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa						

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat nilai koefisien beta (B) untuk masing-masing variabel penelitian. Nilai ini akan dimasukkan dalam rumus regresi linier sederhana.

$$Y = 27,542 + 0,220 \text{ Kompetensi AD} + \text{error}$$

Artinya bahwa ketika kompetensi aparatur desa 0, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 27,542. Begitu juga ketika adanya kompetensi aparatur desa meningkat 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,220 satuan.

Selanjutnya nilai koefisien beta sebesar 0,220. Nilai ini kemudian dimasukkan dalam kriteria menerima atau menolak. Nilai beta $0,220 \neq 0$. Artinya bahwa hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat nilai koefisien beta sebesar 0,220. Nilai ini kemudian dimasukkan dalam kriteria menerima atau menolak. Nilai beta $0,220 \neq 0$. Artinya bahwa hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dapat berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya kompetensi aparatur desa tersebut maka akan berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur desa ini sangat penting harus dimiliki oleh desa. Hal ini karena dapat mendorong aktivitas di desa menjadi lebih efektif dan efisien. Artinya bahwa berkompetennya aparatur terhadap bidang yang dijalannya akan berdampak terhadap berkualitas juga pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini relevan dengan Sri Rahayu Maulana, (2021); Ni Putu Dessy Eka Aryani, (2020); Mereka menyatakan bahwa kompetensi apartur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolalan dana desa. Hal ini karena adanya aparatur yang berkompeten akan menjalani pekerjaan yang bagus. Selain itu, berkomptennya apartur desa dapat menjadi cerminan terhadap keterbukaan pengelolaan dana desa yang bagus. Artinya bahwa kompetensi aparatur desa dapat berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan teori *resources based view*, yang menyatakan bahwa sumber daya yang berkompeten dapat meningkatkan pengelolaan dana desa (Sri Rahayu Maulana, 2021). Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dapat berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya kompetensi aparatur desa tersebut maka akan berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur desa ini sangat penting harus dimiliki oleh desa. Hal ini karena dapat mendorong aktivitas di desa menjadi lebih efektif dan efisien. Artinya bahwa berkompetennya aparatur terhadap bidang yang dijalaninya akan berdampak terhadap berkualitas juga pengelolaan dana desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini yaitu terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5.2 Saran

Untuk praktisi:

- 1) Pengelola dana desa untuk tetap mempertahankan aparatur desa yang memiliki kompetensi yang tinggi, hal ini karena berdampak pengaruhnya dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 2) Selain itu, agar dapat mempertahankan kinerja dari desa tersebut.

Untuk akademisi:

- 1) Agar menambah beberapa variabel bebas lainnya yang berpotensi berpengaruh besar terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel tersebut antara lain pendidikan aparatur dan gender aparatur.
- 2) Mengamati desa lainnya yang ada di Kota Banda Aceh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisasmita, R. (2018). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryani, N.P.D.E., Werastuti, D.N.S., & Adiputra, M.P. (2020) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa dan Keterlibatan Masyarakat terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.11. No.2:178-190.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam IBM SPSS 21: Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hilman. (2016). Pengelolaan Dana Desa melalui kepatuhan hukum dan pengelolaan Administrasi di kabupaten Tangerang. *Jurnal UNIS Syech Yusuf Tangerang*, Vol.4, 44–60.
- Ilhami, M. (2019), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Se Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara). Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Krina. (2019). *Indiator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Sekertariat Good Govermance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Madiasmo. (2018). *Serial Otonomi Daerah: Otonomi Manajemen dan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. Vol.8. No.2:106-115.
- Maulana, S.R. & Napisah, L.S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Dan Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*. Vol 15 No.1:427-443.

- Riska, L.D (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Aparatur, Transparansi, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Aceh. Skripsi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Rozaki, & Abdur, (2017). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Ire Press.
- Sidik, M. (2017). Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Bandung
- Syahbrani, W. (2019). Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister Sains Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada



KUISIONER

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

Kuisisioner ini dibuat dalam rangka penelitian ilmiah untuk Penulisan Skripsi. Hanya kesimpulan keseluruhan hasil penelitian yang akan dianalisa. Keberhasilan informasi akan sangat dijaga. Untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan dari seluruh pihak untuk memberikan informasi yang benar untuk keberhasilan penelitian ini. Dan keberhasilan ini sangat tergantung dari bantuan dan partisipasi Saudara dalam menjawab pertanyaan. Atas bantuan dan pertisipasinya, saya mengucapkan terima kasih dan pengharapan yang setinggi-tingginya.

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon Bapak/Ibu mengisi atau memberi tanda *check lits* (✓) pada salah satu jawaban.

1. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
2. Status Perkawinan : ☐ Belum Menikah ☐ Menikah
☐ Janda / Duda
3. Usia : ☐ < 20 tahun ☐ 40 – 49 tahun
☐ 20 – 29 tahun ☐ > 49 tahun
☐ 30 – 39 tahun
3. Pendidikan Terakhir : ☐ SMA ☐ Sarjana ☐ Doktor
☐ Diploma ☐ Magister
5. Masa Kerja : ☐ < 1 tahun ☐ 6 - 10 tahun
☐ 1 - 5 tahun ☐ > 11 tahun
☐ 16 tahun

PETUNJUK PENGISIAN :

Dimohon Bapak/ibu berkenan memberikan tanggapan atas setiap pertanyaan berikut ini sejujurnya. Tidak ada jawaban benar atau salah untuk setiap jawaban anda. Berikan tanda *check lits* (√) untuk jawaban yang anda pilih.

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 3 = Kurang Setuju (KS) 5 = Sangat Setuju (SS)
2 = Tidak Setuju (TS) 4 = Setuju (S)

A. Kompetensi

No	PERTANYAAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Pekerjaan yang diberikan kepada anda merupakan tanggungjawab yang harus diselesaikan dengan baik					
2	Anda selalu siap membantu rekan kerja atau staf dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan					
3	Meskipun sedang berada dalam tekanan untuk segera menyelesaikan pekerjaan, anda selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan atau tindakan					
4	Anda memiliki pengetahuan teknis yang cukup untuk menjalankan tugas					
5	Anda mampu mengembangkan kreativitas dalam mengimplementasikan Panduan kerja (SOP).					
6.	Aparatur di masing-masing desa anda bekerja pada bidang yang sesuai dengan keterampilannya masing-masing					

B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No	PERTANYAAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Pengambilan keputusan keuangan sudah memenuhi standar etika, nilai-nilai yang berlaku, dan prinsip administrasi yang benar					
2	Semua informasi yang berkaitan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program tersedia dengan lengkap dan akurat					
3	Setiap kegiatan/program yang diambil mempunyai sasaran yang jelas dan telah sesuai dengan visi dan misi organisasi sektor publik					
4	Target operasional dan prioritas program dianggap layak dan konsisten					

5	Adanya bentuk tanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan keputusan keuangan melalui media massa					
6	Adanya kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang jelas atas kebijakan atau program yang telah dilaksanakan					
7	Adanya mekanisme untuk merespon pengaduan dari masyarakat berkaitan penggunaan dana desa					
8.	Tersedianya sistem informasi untuk mengevaluasi kinerja aparatur desa dan memantau kegiatan atau program yang telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis					

Terima Kasih Atas Partisipasinya

Lampiran 2. Tabulasi Data Penelitian

Res	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa									Kompetensi Aparatur Desa						
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	Σ	B1	B2	B3	B4	B5	B6	Σ
1	5	1	1	1	5	5	1	1	20	5	5	4	5	5	5	29
2	5	4	4	4	5	5	4	4	35	5	5	4	5	5	5	29
3	5	5	3	5	5	5	5	3	36	4	5	4	4	4	4	25
4	4	5	5	4	4	4	5	5	36	4	4	3	4	4	4	23
5	5	5	4	3	5	5	5	4	36	5	5	3	3	3	5	24
6	5	4	5	4	4	5	4	5	36	4	4	4	3	4	4	23
7	4	4	4	4	5	4	4	4	33	4	5	3	3	4	4	23
8	4	4	4	4	5	4	4	4	33	4	5	4	3	4	4	24
9	4	5	4	5	5	4	5	4	36	4	5	3	4	4	4	24
10	4	3	4	4	5	4	3	4	31	3	5	4	3	3	3	21
11	4	4	4	4	5	4	4	4	33	4	5	4	4	1	4	22
12	4	4	4	4	5	4	4	4	33	5	5	5	3	3	5	26
13	5	4	4	4	5	5	4	4	35	5	5	5	3	3	5	26
14	4	4	3	4	5	4	4	3	31	3	5	4	3	3	3	21
15	5	4	5	4	5	5	4	5	37	5	5	4	4	4	5	27
16	5	3	4	3	5	5	3	4	32	4	5	5	3	4	4	25
17	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	3	4	23
18	5	5	3	4	5	5	5	3	35	4	5	4	4	4	4	25
19	4	5	5	4	4	4	5	5	36	3	4	5	3	3	3	21
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	3	4	1	4	20
21	3	4	4	3	5	3	4	4	30	4	5	3	4	3	4	23
22	4	3	4	3	5	4	3	4	30	4	5	5	3	3	4	24
23	5	4	4	5	5	5	4	4	36	4	5	4	4	3	4	24
24	3	4	3	3	5	3	4	3	28	3	5	3	3	3	3	20
25	3	4	5	3	4	3	4	5	31	5	4	3	4	1	5	22
26	4	3	4	3	5	4	3	4	30	3	5	3	3	3	3	20
27	3	2	4	4	5	3	2	4	27	5	5	4	4	3	5	26
28	5	3	5	4	5	5	3	5	35	4	5	3	4	4	4	24
29	3	3	5	3	5	3	3	5	30	5	5	5	4	4	5	28
30	4	4	4	5	5	4	4	4	34	4	5	5	4	1	4	23
31	5	3	4	3	5	5	3	4	32	3	5	5	3	3	3	22
32	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	24
33	3	5	4	3	4	3	5	4	31	3	4	3	3	5	3	21
34	4	5	5	4	5	4	5	5	37	4	5	3	3	3	4	22
35	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	5	4	3	4	24

36	3	3	4	4	4	3	3	4	28	4	4	4	4	3	4	23
37	3	4	5	3	5	3	4	5	32	4	5	4	4	4	4	25
38	4	5	5	4	4	4	5	5	36	5	4	4	4	4	5	26
39	2	4	4	5	5	2	4	4	30	3	5	4	4	3	3	22
40	4	5	5	4	4	4	5	5	36	4	4	3	4	4	4	23
41	3	4	4	4	4	3	4	4	30	4	4	5	4	3	4	24
42	4	5	5	5	5	4	5	5	38	3	5	5	5	3	3	24
43	5	5	5	5	5	5	5	5	40	4	5	4	4	4	4	25
44	4	2	3	3	5	4	2	3	26	4	5	2	3	3	4	21
45	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	3	4	3	4	22
46	4	5	4	4	5	4	5	4	35	4	5	2	3	3	4	21
47	3	5	4	4	4	3	5	4	32	4	4	4	4	3	4	23
48	3	4	4	3	5	3	4	4	30	3	5	4	4	3	3	22
49	4	2	4	4	5	4	2	4	29	4	5	4	4	4	4	25
50	3	3	4	3	4	3	3	4	27	4	4	4	4	4	4	24
51	5	5	3	4	5	5	5	3	35	4	5	2	3	3	4	21
52	5	4	5	5	5	5	4	5	38	5	5	4	5	5	5	29
53	5	3	4	3	5	5	3	4	32	4	5	5	4	3	4	25
54	5	5	5	5	5	5	5	5	40	4	5	5	5	5	4	28
55	4	3	5	4	5	4	3	5	33	3	5	3	3	5	3	22

Lampiran 3. Hasil Pengujian Validitas

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Correlations										
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	Y
A1	Pearson Correlation	1	.056	-.076	.140	.304*	1.000**	.056	-.076	0.490**
	Sig. (2-tailed)		.684	.583	.309	.024	.000	.684	.583	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
A2	Pearson Correlation	.056	1	.356**	.525**	-.222	.056	1.000**	.356**	0.762**
	Sig. (2-tailed)	.684		.008	.000	.103	.684	.000	.008	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
A3	Pearson Correlation	-.076	.356**	1	.394**	-.214	-.076	.356**	1.000**	0.612**
	Sig. (2-tailed)	.583	.008		.003	.116	.583	.008	.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
A4	Pearson Correlation	.140	.525**	.394**	1	.020	.140	.525**	.394**	0.699**
	Sig. (2-tailed)	.309	.000	.003		.884	.309	.000	.003	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
A5	Pearson Correlation	.304*	-.222	-.214	.020	1	.304*	-.222	-.214	0.557
	Sig. (2-tailed)	.024	.103	.116	.884		.024	.103	.116	.677
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
A6	Pearson Correlation	1.000**	.056	-.076	.140	.304*	1	.056	-.076	0.490**
	Sig. (2-tailed)	.000	.684	.583	.309	.024		.684	.583	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
A7	Pearson Correlation	.056	1.000**	.356**	.525**	-.222	.056	1	.356**	0.762**
	Sig. (2-tailed)	.684	.000	.008	.000	.103	.684		.008	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
A8	Pearson Correlation	-.076	.356**	1.000**	.394**	-.214	-.076	.356**	1	0.612**
	Sig. (2-tailed)	.583	.008	.000	.003	.116	.583	.008		.000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Y	Pearson Correlation	0.490**	0.762**	0.612**	0.699**	0.557	0.490**	0.762**	0.612**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.677	.000	.000	.000	
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Kompetensi Aparatur Desa

Correlations

		B1	B2	B3	B4	B5	B6	X
B1	Pearson Correlation	1	.000	.068	.326*	.091	1.000**	0.706**
	Sig. (2-tailed)		1.000	.620	.015	.508	.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
B2	Pearson Correlation	.000	1	.032	-.089	.102	.000	0.529
	Sig. (2-tailed)	1.000		.816	.520	.461	1.000	.092
	N	55	55	55	55	55	55	55
B3	Pearson Correlation	.068	.032	1	.239	.005	.068	0.480**
	Sig. (2-tailed)	.620	.816		.079	.974	.620	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
B4	Pearson Correlation	.326*	-.089	.239	1	.187	.326*	0.600**
	Sig. (2-tailed)	.015	.520	.079		.171	.015	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
B5	Pearson Correlation	.091	.102	.005	.187	1	.091	0.538**
	Sig. (2-tailed)	.508	.461	.974	.171		.508	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
B6	Pearson Correlation	1.000**	.000	.068	.326*	.091	1	0.706**
	Sig. (2-tailed)	.000	1.000	.620	.015	.508		.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
X	Pearson Correlation	0.706**	0.529	0.480**	0.600**	0.538**	0.706**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.092	.000	.000	.000	.000	
	N	55	55	55	55	55	55	55

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.728	8

Variabel Kompetensi Aparatur Desa

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.710	6

Lampiran 5. Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Aparatur Desa
N		55	55
Normal Parameters ^a	Mean	18.56	18.06
	Std. Deviation	2.567	2.075
Most Extreme Differences	Absolute	0.212	0.316
	Positive	0.212	0.116
	Negative	0.204	0.083
Kolmogorov-Smirnov Z		0.979	0.966
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.319	0.215
a. Test distribution is Normal.			

Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.138 ^a	0.019	0.001	3,670	1.82
a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur Desa					
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa					

Heterokedastisitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	27.542	5.168		5.329	0.000		
	Kompetensi	0.220	.217	0.138	1.015	0.355	0.949	1.085

a. Dependent Variable: abresid

Lampiran 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.138 ^a	0.019	0.001	3.670

a. Predictors: (Constant), Kompetensi AD

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	13.882	1	13.882	1.030	0.315 ^a
Residual	714.045	53	13.473		
Total	727.927	54			

a. Predictors: (Constant), Kompetensi AD

b. Dependent Variable: Akuntabilitas PDD

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.542	5.168		5.329	0.000
Kompetensi AD	0.220	.217	0.138	1.015	0.315

a. Dependent Variable: Akuntabilitas PDD

Lampiran 7. Nilai R_{tabel}

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244

Lampiran 8. Nilai Durbin Watson

<i>n</i>	<i>k</i> = 1		<i>k</i> = 2		<i>k</i> = 3		<i>k</i> = 4		<i>k</i> = 5	
	<i>d_L</i>	<i>d_U</i>	<i>d_L</i>	<i>d_U</i>	<i>d_L</i>	<i>d_U</i>	<i>d_L</i>	<i>d_U</i>	<i>d_L</i>	<i>d_U</i>
15	0.81	1.07	0.70	1.25	0.59	1.46	0.49	1.70	0.39	1.96
16	0.84	1.09	0.74	1.25	0.63	1.44	0.53	1.66	0.44	1.90
17	0.87	1.10	0.77	1.25	0.67	1.43	0.57	1.63	0.48	1.85
18	0.90	1.12	0.80	1.26	0.71	1.42	0.61	1.60	0.52	1.80
19	0.93	1.13	0.83	1.26	0.74	1.41	0.65	1.58	0.56	1.77
20	0.95	1.15	0.86	1.27	0.77	1.41	0.68	1.57	0.60	1.74
21	0.97	1.16	0.89	1.27	0.80	1.41	0.72	1.55	0.63	1.71
22	1.00	1.17	0.91	1.28	0.83	1.40	0.75	1.54	0.66	1.69
23	1.02	1.19	0.94	1.29	0.86	1.40	0.77	1.53	0.70	1.67
24	1.04	1.20	0.96	1.30	0.88	1.41	0.80	1.53	0.72	1.66
25	1.05	1.21	0.98	1.30	0.90	1.41	0.83	1.52	0.75	1.65
26	1.07	1.22	1.00	1.31	0.93	1.41	0.85	1.52	0.78	1.64
27	1.09	1.23	1.02	1.32	0.95	1.41	0.88	1.51	0.81	1.63
28	1.10	1.24	1.04	1.32	0.97	1.41	0.90	1.51	0.83	1.62
29	1.12	1.25	1.05	1.33	0.99	1.42	0.92	1.51	0.85	1.61
30	1.13	1.26	1.07	1.34	1.01	1.42	0.94	1.51	0.88	1.61
31	1.15	1.27	1.08	1.34	1.02	1.42	0.96	1.51	0.90	1.60
32	1.16	1.28	1.10	1.35	1.04	1.43	0.98	1.51	0.92	1.60
33	1.17	1.29	1.11	1.36	1.05	1.43	1.00	1.51	0.94	1.59
34	1.18	1.30	1.13	1.36	1.07	1.43	1.01	1.51	0.95	1.59
35	1.19	1.31	1.14	1.37	1.08	1.44	1.03	1.51	0.97	1.59
36	1.21	1.32	1.15	1.38	1.10	1.44	1.04	1.51	0.99	1.59
37	1.22	1.32	1.16	1.38	1.11	1.45	1.06	1.51	1.00	1.59
38	1.23	1.33	1.18	1.39	1.12	1.45	1.07	1.52	1.02	1.58
39	1.24	1.34	1.19	1.39	1.14	1.45	1.09	1.52	1.03	1.58
40	1.25	1.34	1.20	1.40	1.15	1.46	1.10	1.52	1.05	1.58
45	1.29	1.38	1.24	1.42	1.20	1.48	1.16	1.53	1.11	1.58
50	1.32	1.40	1.28	1.45	1.24	1.49	1.20	1.54	1.16	1.59
55	1.36	1.43	1.32	1.47	1.28	1.51	1.25	1.55	1.21	1.59
60	1.38	1.45	1.35	1.48	1.32	1.52	1.28	1.56	1.25	1.60
65	1.41	1.47	1.38	1.50	1.35	1.53	1.31	1.57	1.28	1.61